

# PROFIL OCFI



OCFI, konsorsium yang terdiri dari Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Governance Institute (IGI), dan Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink), didirikan pada tahun 2023 dengan tujuan memperkuat tata kelola pendanaan perubahan iklim di tingkat Nasional dan Sub Nasional. Mereka berperan dalam mengawal agar pengelolaan dana perubahan iklim menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. OCFI memulai inisiatifnya dengan melakukan studi tentang tata kelola pendanaan perubahan iklim di tingkat Nasional dan Provinsi Jambi.



## ANGGOTA

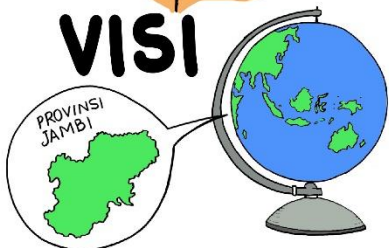
- IBC (Indonesia Budget Center)
- IGI (Indonesian Governance Institute)
- Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink)



Kajian ini difokuskan pada 3 poin penting meliputi:

- (1) Gambaran sumber pendanaan perubahan iklim di Indonesia termasuk mekanisme penyaluran, serta siapa penerima manfaat dana tersebut
- (2) Rumusan strategi pengawasan bagi masyarakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pendanaan perubahan iklim
- (3) Rekomendasi kebijakan penyaluran dana perubahan iklim agar lebih efektif dan efisien serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. rangkumlah kalimat berikut

## VISI



Mewujudkan pengelolaan pendanaan perubahan iklim di Indonesia yang transparan, akuntabel, dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan-- masyarakat.



## TUJUAN

1. Penguatan Tata Kelola Pendanaan
2. Transparansi dan Akuntabilitas
3. Kajian dan Analisis
4. Strategi Pengawasan Masyarakat
5. Rekomendasi Kebijakan



# PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

## KEY QUESTION STUDY

- Memperoleh gambaran secara rinci mengenai sumber pendanaan perubahan iklim, besaran atau jumlah dan mekanisme penyaluran
- Merumuskan strategi agar masyarakat dapat memantau transparansi dan akuntabilitas pendanaan perubahan iklim
- Memberikan rekomendasi kebijakan agar penyaluran dana perubahan iklim dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia



Ruang lingkup studi  
(Kementerian/Lembaga,  
seperti KLHK, Kemenkeu,  
BKF Kemenkeu,  
BPD LH, BPD PKS  
dan PT SMI)

Waktu:  
enam bulan,  
mulai  
Juli - Desember 2023



## REALISASI DARI APBN DAN APBD

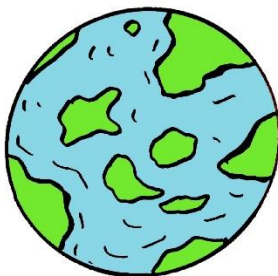


Dari 2016-2021, APBN total Rp554,61 triliun, rata-rata Rp92,435 triliun per tahun. Pada 2018-2020, Rp307,94 triliun atau 4,3% APBN, 74% untuk mitigasi, 26% adaptasi. Alokasi APBD lingkungan hidup rata-rata 1,7%, tertinggi 3% pada 2021.

## REALISASI DARI DANA INTERNASIONAL

### Bilateral

Australia, Kanada, Norwegia, Swedia, Perancis, Inggris, Jerman, Denmark, Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Korea selatan dan Cina



### Multilateral

Lembaga lembaga dalam skema mekanisme finansial UNFCCC, PBB, Multi Development Banks-MDBs, Bank Swasta Internasional, non UNFCCC

## SEKTOR PERUNTUKKAN PENDANAAN

Berdasarkan kompilasi BUR Indonesia, kecuali BUR ke-1 (tahun 2008-2014), diketahui alokasi pendanaan selama 2015-2019 tertinggi untuk sektor energi (43,5%), disusul sektor transportasi (43,4%), dan terakhir, pertanian (0,01%).

Instrumen pendanaan untuk sektor energi adalah pinjaman sebesar US\$2.393,51 juta dan hibah US\$35,06 juta. Transportasi US\$2.419,09 juta dan hibah US\$3,25 juta.

# LEMBAGA PENGELOLA DANA

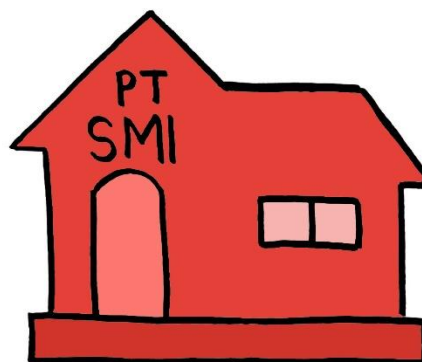
## Perubahan Iklim Di Indonesia



BPD LH bertanggung jawab dalam mengelola dana lingkungan hidup yang mencakup berbagai program dan inisiatif untuk menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia



Bertujuan untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari pungutan ekspor CPO dan turunannya.



PT. SMI, lembaga yang berperan dalam pengembangan keuangan untuk pertumbuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.



Mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim digunakan untuk memastikan bahwa alokasi dana diarahkan pada kegiatan yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



Result Based Payment (RBP) adalah skema pembayaran dari pihak lain yang memiliki kewajiban menurunkan emisi GRK dalam Perjanjian Paris. Negara maju, yang tidak lagi memiliki hutan luas.



PT PLN melaksanakan program JEP dan ETM untuk mencapai Net Zero Emission 2060.



## BAGAIMANA TATA KELOLA PENGELOLA DANA PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA DAN ORIENTASI GESI?

### METODE PENILAIAN GOVERNANCE ASSESSMENT



#### BPD LH

1. Aspek Integritas: Sangat baik (skor 88)
2. Aspek Akuntabilitas: Cukup (skor 57)
3. Aspek Transparansi: Baik (skor 67)
4. Aspek Metode Identifikasi Kebijakan: Baik (skor 80)

#### BPD PKS

1. Aspek Integritas: Baik (76).
2. Aspek Akuntabilitas: Cukup (52).
3. Aspek Transparansi: Cukup (58).
4. Aspek Metode Identifikasi Kebijakan: Baik (80)

#### PT. SMI

1. Aspek Integritas: Sangat Baik (92).
2. Aspek Akuntabilitas: Baik (71).
3. Aspek Transparansi: Cukup (58).
4. Aspek Metode Identifikasi Kebijakan: Cukup (60)

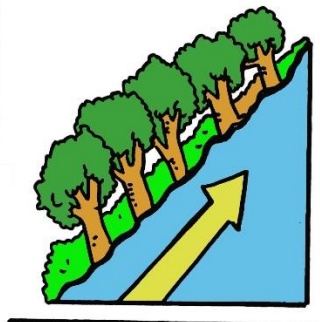
## REKOMENDASI PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

- Mengembangkan ekosistem pendanaan baru untuk mendukung NDC 2030.
- Menyusun mekanisme pendanaan yang inovatif dari dalam dan luar negeri.
- Membangun sistem anti korupsi untuk memastikan integritas dan transparansi.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan fokus pada gender, equality, dan social inclusion.
- Diversifikasi sumber pendapatan dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah.

## KENAPA JAMBI?



## GAMBARAN UMUM



Pada tahun 2010, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mengidentifikasi Provinsi Jambi sebagai kontributor emisi karbon yang signifikan di Indonesia, dengan emisi karbon tahunan sebesar 57 MtCO<sub>2</sub>e pada tahun 2005, setara dengan 3% dari total emisi Indonesia.



- o Dalam Negeri
  - § APBD
  - § Blended Financing
- o Luar Negeri
- o Pendanaan Program Bio Carbon Fund Jambi

## DANA IMBAL JASA LINGKUNGAN



**MEKANISME TATA KELOLA DANA IMBAL JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUJANG RABA OLEH DAMPINGAN KKI WARSI.**

## TANTANGAN TATA KELOLA



1. KELEMBAGAAN YANG TIDAK MEMADAI
2. KETERGANTUNGAN PADA KEMAMPUAN FISKAL DAERAH
3. PAGU ANGGARAN TETAP DENGAN TUGAS BERTAMBAH
4. KETEPATAN WAKTU LAPORAN KEGIATAN

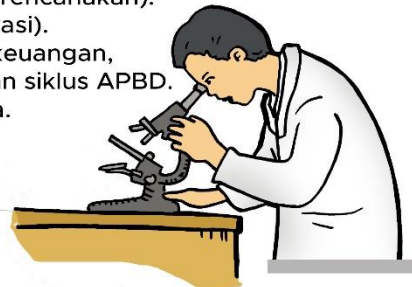


### Alokasi APBD untuk Perubahan Iklim (2019-2022)

- Total: Rp. 628 miliar (rata-rata Rp. 157 miliar/tahun).
- Pembagian alokasi:
  - Adaptasi: Rp. 501 miliar
  - Mitigasi: Rp. 95 miliar
  - Lintas bidang: Rp. 31 miliar
- Mewakili sekitar 3,4% dari total APBD Provinsi Jambi setiap tahunnya.

### Pendanaan Luar Negeri untuk Program BioCF-ISFL (2022-2023):

- Realisasi: Rp. 46,5 miliar (55% dari yang direncanakan).
- Tahun 2022: Rp. 25,7 miliar (79% dari alokasi).
- Tantangan: Proses administratif, standar keuangan, ketidaksesuaian rencana anggaran dengan siklus APBD.
- Gagal reimbursement 2022: Rp. 707,7 juta.
- Tahun 2023: Rp. 19,92 miliar (82% dari alokasi Rp. 24,3 miliar).



## KENDALA IMPLEMENTASI



- Keterbatasan kemampuan fiskal.
- Mekanisme pemberian yang memerlukan penggunaan APBD untuk menyiapkan dana talangan.
- Masalah teknis administrasi, termasuk perbedaan satuan biaya yang direncanakan dan dilaksanakan.

## BAGAIMANA TATA KELOLA DAN GESI DI BIOCF-ISFL JAMBI?



### Tata Kelola

- § Aspek Integritas: “baik” dengan skor 65
- § aspek akuntabilitas: “cukup” dengan skor 60
- § aspek transparansi: “baik” dengan skor 70
- § aspek identifikasi kebijakan: “baik” dengan skor 67

**Partisipasi GESI** dalam tahap pre-investasi Program BioCF ISFL saat ini sebatas informasi dan konsultasi, belum sampai pada pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan penanganan perubahan iklim di area penerima manfaat program.

## REKOMENDASI

- Menerbitkan kebijakan transparansi dan akuntabilitas melalui peraturan daerah, gubernur, dan peraturan lainnya untuk memudahkan pemahaman masyarakat.
- Pembentukan lembaga atau unit pelaksana teknis daerah untuk mengelola program penanganan perubahan iklim lintas sektoral.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya GEDSI, dari perencanaan hingga pelaksanaan program BioCF ISFL pada tahap Result Based Payment (RBP).





## IMBAL JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN BUJANG RABA DI JAMBI

### BUJANG RABA (BUKIT PANJANG RANTAU BAYUR)



- Kawasan hutan lindung di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
- Proyek REDD untuk mengurangi emisi CO2 sekitar 630.000 tCO2.
- Melibatkan lima komunitas adat dalam perlindungan hutan seluas 7.291 Ha.

### KEGIATAN REDD



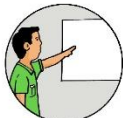
- Zona lindung dan zona pemanfaatan dalam pengelolaan hutan desa.
- Pengembangan ekowisata, komoditas bertingkat, dan pertanian organik.

### PERSIAPAN PROGRAM IMBAL JASA LINGKUNGAN



- Musyawarah untuk usulan program jasa lingkungan.
- MoU dengan lembaga perantara, termasuk aspek manfaat bagi masyarakat.

### PERENCANAAN PROGRAM



- Rencana kerja tahunan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.
- Partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat dalam diskusi dan patroli hutan.

### IMPLEMENTASI PROGRAM



- Mendukung kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
- Partisipasi aktif kelompok masyarakat termasuk perempuan, laki-laki, dan pemuda.

### ALOKASI IMBAL JASA LINGKUNGAN



- Setiap desa mendapat dana Rp. 386 juta untuk imbal jasa lingkungan.
- Anggaran untuk pengamanan hutan desa dan kesejahteraan masyarakat.





- Provinsi Jambi memiliki regulasi yang kuat untuk mengelola Dana Iklim, termasuk Perda terkait DAU, RTRW, Jasa Lingkungan, Energi, dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
- Pembentukan lembaga pengendalian iklim perlu didasarkan pada Undang-undang dengan fokus pada jenis gas rumah kaca dan tata kelola yang baik.
- Sekretariat BioCF-ISFL Jambi perlu memperkuat kepakaran seperti meteorologi, klimatologi, dan kesehatan vector-borne.
- Kelembagaan pengelolaan dana perubahan iklim membutuhkan regulasi kuat, komitmen, tata kelola, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.



- Jambi segera membentuk lembaga khusus untuk pengendalian perubahan iklim berdasarkan fondasi yang ada.
- Mengadopsi inisiatif global seperti Local Open Government Partnership, SDGs, dan EITI untuk memastikan integritas dan akuntabilitas.
- Pilih kelembagaan yang sesuai dengan kondisi lokal, dengan keseimbangan peran antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta.
- Perlu roadmap untuk memperkuat atau membentuk kelembagaan dan tata kelola pengendalian perubahan iklim di Jambi, termasuk integrasi dengan lembaga yang sudah ada.

10.



## RISET KEBIJAKAN DAN ADVOKASI TATA KELOLA PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM DI NASIONAL DAN PROVINSI JAMBI

### EXTERNAL CONTEXT

Ada 2 faktor yang mempengaruhi program

- Kerjasama dengan Pemerintah dan Non Pemerintah: : Adanya dukungan penuh dari Kementerian Keuangan, BPD LH, BRIN, dan Pemerintah Provinsi Jambi.
- Kondisi Politik: didominasi skema hutang dibandingkan hibah. Isu utang luar negeri dalam pilpres 2024 sangat sensitif.

Dalam debat pilpres 2024, salah satu pasangan calon telah memunculkan isu climate change. Ini menunjukkan isu tersebut di masa depan semakin vital



### TANTANGAN

Tantangan Tingkat Nasional:

1. Isu pendanaan perubahan iklim kurang populer.
2. Perlu upaya lebih untuk menjadi isu nasional.
3. Pengelolaan dan keterbukaan informasi terbatas.

Tantangan Tingkat Sub-Nasional (Provinsi):

1. Isu baru di kalangan penggiat lingkungan dan kebijakan.
2. Tantangan serupa di Pemerintah Provinsi Jambi.



### PELUANG

1. Perubahan iklim jadi prioritas pemerintahan Jokowi.
2. Alokasi APBN untuk perubahan iklim 7% (praktik 4%).
3. Indonesia prioritas pendanaan luar negeri untuk perubahan iklim.
4. Kebijakan terkait: energi terbarukan, perdagangankarbon, pajak karbon, transisi energi berkeadilan.



### PEMBELAJARAN

1. Isu tata kelola pendanaanperubahan iklim belum populer.
2. Publikasi di media massa masih sedikit.
3. Pentingnya keterbukaan informasi tata kelola pendanaan perubahan iklim.
4. Perlunya UU dan lembaga khusus perubahan iklim di daerah.
5. Belum ada lembaga permanen untuk perubahan iklim.

### DAMPAK TAMBAHAN PROGRAM

Nasional:

1. Website BPD LH lebih informatif.
2. Jaringan sipil mulai fokus tata kelola pendanaan perubahan iklim.

Sub-Nasional:

1. Masukan OCFI diadopsi dalam Peraturan Gubernur Jambi.
2. Kerjasama dengan Dinas ESDM Jambi untuk transisi energi berkeadilan.
3. Masukan OCFI diadopsi Sekretariat BioCF ISFL Jambi.